



DPRD Dorong Pansus Penertiban Pedagang

● ERIC ISKANDARSJAH

Kemungkinan pekan depan pertemuan antara dewan dan pemkot dapat digelar.

YOGYAKARTA — Komisi B DPRD Kota Yogyakarta bakal mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) terkait penertiban pedagang di selatan Stasiun Tugu. Palsunya, sudah sekitar sebulan diterbitkan, namun para pedagang mengaku belum mendapat solusi apapun untuk dapat melanjutkan aktivitas perekonomiannya.

Hal tersebut mengemuka saat perwakilan pedagang menemui anggota DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (4/8). Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, mengatakan setelah mendapat penjelasan

dari pihak pedagang, maka dewan bakal memanggil jajaran pemkot. "Nantinya, pihak pemkot diberi kesempatan untuk menjelaskan atau klarifikasi," katanya, Jumat (4/8).

Pihaknya berharap pemkot dapat menjelaskan mengenai langkah penertiban pedagang di sepanjang Jalan Pasar Kembang tersebut. Selain itu, pemkot juga akan diminta untuk menjelaskan mengenai Perwal 51 Tahun 2017 tentang Pasar serta nasib para pedagang ke depan.

Diungkapkan, kemungkinan pada pekan depan pertemuan antara DPRD dan pemkot dapat digelar. Menurutnya, pansus perlu dibentuk jika ternyata pemkot tidak dapat memberikan klarifikasi yang cukup memuaskan atau belum memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang.

Ia menambahkan, pembentukan pansus juga bertujuan agar persoalan ini dapat segera terselesaikan. "Belajar dari relokasi Pasar Klihitan, pansus ini diharapkan dapat

memberi kewenangan dan pengawasan dewan terhadap kinerja pihak eksekutif dengan lebih optimal".

Ketua Paguyuban Pedagang Resmi Pasar Kembang Manunggal Karsa Rudi Tri Purnama, menuturkan berharap agar pemkot memikirkan nasib pedagang yang terkena penertiban. "Kami masih memiliki KBP. Namun sampai saat ini belum ada solusi apapun dari pemerintah kota," katanya.

Ia mengatakan pedagang bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga telah mengadakan persoalan ini kepada Ombudsman DIY. Mereka kecewa karena penertiban dilakukan namun tanpa dibarengi dengan rambu-rambu terkait solusi bagi pedagang.

"Tidak ada satupun pihak yang memberikan solusi atas langkah apa yang dapat kami lakukan agar kami dapat kembali melakukan kegiatan ekonomi secara resmi setelah adanya pengurusan ini," kata Rudi.

Pada hal, menurutnya, selama bertahun-tahun, seluruh pedagang

secara rutin membayar retribusi resmi. Namun dengan kejadian ini membuat pedagang yang telah berperan dalam memberikan pendapatan daerah, merasa diabaikan. "Ada 71 kios yang sudah dihancurkan," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan bahwa KBP bukan merupakan bukti kepemilikan atas kios atau los. Sehingga jika pasar sudah tidak ada maka KBP tersebut tidak berlaku.

"Kartu tersebut menjadi bukti pedagang untuk melakukan usaha. Retribusi pun hanya dipungut saat mereka melakukan kegiatan usaha," katanya, yang berjanji akan mencari solusi bersama atas nasib pedagang Pasar Kembang terdampak penertiban.

Lokasi bekas pedagang Pasar Kembang yang berada di sisi selatan Stasiun Tugu tersebut akan diubah menjadi trotoar untuk mendukung penataan kawasan Malio-boro. kominfosandi@jogjakota.go.id

Sekretaris

Instansi	Nilai Berita
1. <i>Disperindag</i>	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

v Segera v Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005